

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Keuangan

1. Pengertian manajemen keuangan sekolah

Manajemen keuangan di sekolah bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan proses strategis yang dirancang, dijalankan, dan diawasi secara berkelanjutan. Dengan mengelola biaya operasional secara optimal dan sungguh-sungguh, sekolah dapat memastikan bahwa seluruh kegiatan pendidikannya berlangsung secara efektif dan efisien guna mewujudkan tujuan pendidikan yang telah dirancang.¹⁵

Menurut Mulyasa, siklus manajemen keuangan pada dasarnya mencakup tiga tahapan utama: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Merujuk pada pandangan Jones, tahap perencanaan (*budgeting*) merupakan upaya sistematis untuk menyinergikan seluruh sumber daya demi mencapai target, tanpa menimbulkan dampak yang merugikan. Selanjutnya, tahap pelaksanaan (*accounting*) adalah proses merealisasikan anggaran sesuai rencana awal, dengan tetap membuka ruang fleksibilitas untuk penyesuaian jika dinamika di lapangan menuntut hal tersebut. Rangkaian ini kemudian ditutup dengan tahap

¹⁵ Mulyono, Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), 181

evaluasi untuk menilai sejauh mana tujuan awal telah berhasil dicapai.¹⁶

Merujuk pada pandangan Nanang Fattah, pembiayaan pendidikan pada dasarnya adalah seluruh aliran dana yang dihimpun dan dialokasikan untuk memutar roda operasional sekolah. Dana ini tidak hanya digunakan untuk kebutuhan dasar seperti pembayaran gaji guru dan penyediaan fasilitas belajar, tetapi juga menjadi fondasi bagi program pengembangan mutu, seperti pendanaan kegiatan ekstrakurikuler siswa, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, hingga pelaksanaan supervisi pendidikan.

Sulistiyorini menjelaskan bahwa konsep manajemen keuangan dapat dilihat dari dua sudut pandang. Secara sempit, aktivitas ini kerap dipahami sekadar sebagai proses pembukuan administratif. Namun dalam cakupan yang lebih luas, manajemen keuangan adalah sebuah tata kelola menyeluruh dimulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan, hingga pengawasan. Pada akhirnya, seluruh siklus ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada berbagai pihak yang berkepentingan, baik itu masyarakat maupun pemerintah di tingkat daerah hingga pusat.

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen keuangan pendidikan pada hakikatnya adalah sebuah proses yang runtut dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Alurnya

¹⁶ Dr. Arwildayanto, manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan (widya padjajaran anggota IKAPI JABAR, 2017).

membentuk sebuah sistem; diawali dengan bagaimana dana direncanakan dan digunakan, lalu terus dikawal melalui proses evaluasi dan pengawasan, untuk kemudian diakhiri dengan penyusunan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁷

2. Tujuan manajemen keuangan sekolah

Secara garis besar, manajemen keuangan di sekolah bertujuan untuk memetakan dan mencari dana demi kelancaran seluruh kegiatan operasional. Setelah dana didapatkan, tugas krusial selanjutnya adalah memastikan uang tersebut dibelanjakan seefektif mungkin, yang tentunya harus dibuktikan melalui pelaporan yang jelas, terbuka, dan bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.

Suad Husnan memberikan pandangan bahwa kehadiran manajemen keuangan bertujuan agar pengelola lembaga pendidikan lebih terampil dalam mencari dan memanfaatkan berbagai sumber pendanaan. Harapannya, ketersediaan dana menjadi cukup memadai untuk membiayai program-program sekolah, dan seluruh alur penggunaannya dapat dilaporkan secara akuntabel..

Nawawi menjelaskan bahwa tujuan diadakannya manajemen keuangan di sekolah adalah untuk menata arus dana melalui kebijakan-kebijakan yang matang, baik saat dana itu digali maupun saat dibelanjakan. Agar visi lembaga pendidikan bisa tercapai, tata kelola ini harus diwujudkan dalam langkah-langkah nyata mulai dari menyusun

¹⁷ Komariah, “konsep manajemen keuangan pendidikan.”

rencana, mengatur pengeluaran, mengawasi aliran uang, sampai mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang terpakai.¹⁸

Lebih spesifik lagi, Kadarman dan Udaya menegaskan bahwa tata kelola keuangan yang baik memiliki tiga sasaran esensial. Sistem ini dirancang untuk mendorong efektivitas dan efisiensi dalam setiap pembelanjaan sekolah, serta membangun iklim transparansi dan akuntabilitas agar pengelolaan dana lebih terbuka. Muara dari kedua hal tersebut adalah terciptanya kontrol yang kuat untuk menutup celah dan meminimalisasi potensi penyalahgunaan anggaran.¹⁹

Oleh karena itu, kehadiran pengelola sekolah dan komite sangat dibutuhkan untuk menata tata keuangan dengan baik, tentunya dengan melibatkan sumbangsih seluruh elemen di sekolah. Melalui praktik manajemen yang mumpuni, sekolah tidak hanya mampu merencanakan dan mengupayakan ketersediaan dana, tetapi juga membukukannya secara transparan. Pada akhirnya, ketika dana dikelola dengan perhitungan yang efektif dan efisien, seluruh program pendidikan dapat berjalan semestinya sehingga roda pembelajaran siswa terhindar dari hambatan finansial.

3. Perencanaan keuangan sekolah

Merujuk pada gagasan E. Mulyasa mengenai Manajemen Berbasis Sekolah, tahap perencanaan keuangan pada dasarnya adalah upaya strategis memproyeksikan dari mana dana akan didapat agar visi

¹⁸ manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan

¹⁹ MS, "manajemen keuangan pendidikan."

pendidikan di sekolah bisa terwujud maksimal. Di tingkat sekolah, wujud nyata dari perencanaan ini berfokus pada dua kegiatan pokok: menyusun rincian anggaran keuangan dan memformulasikan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Adapun penjelasan dari kedua aktivitas tersebut adalah:

a. Penyusunan rencana anggaran

Hartman mendefinisikan anggaran sebagai “sebuah dokumen yang menentukan pengeluaran yang direncanakan dan mendapatkan antisipasi dari sebuah sekolah dalam satu tahun anggaran, bersama dengan data lain dan informasi yang berkaitan dengan elemen anggaran dengan filosofi pendidikan, program, dan kebutuhan pemerintah”.²⁰ Kepala sekolah harus mampu menyusun Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS), RAPBS/M merupakan rencana perolehan pembiayaan pendidikan dari berbagai sumber pendapatan serta susunan kerja tahunan yang terdiri dari sejumlah kegiatan anggaran rutin, Dana Penunjang Pendidikan (DPP), Subsidi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (SBPP), Bantuan Operasional dan Perawatan (BOP), Bantuan Operasional Sekolah/madrasah (BOS), BP3, donatur, badan usaha, serta sumbangan lainnya. Untuk sekolah swasta sumber dana berasal dari SPP, subsidi pemerintah, donatur, yayasan, dan masyarakat

²⁰ Allan R. Odden & Lawrence O. Picus, *School Finance A policy Perspective*, Fourth Edition, (United States: The McGraw Hill Companies, 2007), p. 235.

secara luas.²¹ Serta beberapa kegiatan lainnya disertai rincian rencana pembiayaannya dalam satu tahun anggaran. Untuk itu, kepala sekolah harus mengetahui sumber-sumber dana yang merupakan sumber daya sekolah

b. Pengembangan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS)

Setelah penyusunan rencana anggaran, perencanaan keuangan memasuki kegiatan pengembangan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) pada umumnya menempuh langkah-langkah dengan prosedur sebagai berikut:

- 1) Pada tingkat kelompok kerja
- 2) Pada tingkat kerja sama dengan komite sekolah
- 3) Sosialisasi dan legalitas²²

Untuk menyusun anggaran yang akurat, sekolah perlu menunjuk sebuah kelompok kerja. Tugas utama tim perumus ini adalah mendata secara rinci biaya apa saja yang diperlukan, lalu mengklasifikasikan dan mengalkulasi besaran dananya. Dari hasil pendanaan tersebut, sekolah bisa menyeleksi dan menentukan ke pos-pos mana saja dana itu akan disalurkan agar sejalan dengan kebutuhan riil di lapangan.

²¹ Dr. H.A. Rusdiana MM dan Drs. H. Wardija M.AP, manajemen keuangan sekolah (ARSAD PRESS, t.t.).

²² E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, Cet. 5, (Bandung: Remaja, Rosdakarya, 2005), hlm. 200

Pada tahapan selanjutnya, pelibatan komite sekolah menjadi elemen yang sangat penting. Komite hadir sebagai mitra strategis yang bertugas memberikan pertimbangan sekaligus mengawasi arah kebijakan program sekolah. Tim perumus anggaran akan bekerja sama dengan komite untuk menyusun dan menyempurnakan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Proses ini dilanjutkan dengan tahapan legalisasi, di mana rancangan yang telah dibahas tersebut dilaporkan kepada pihak pengawas. Sebagai langkah pengesahan akhir, usulan anggaran diserahkan kepada yayasan untuk mendapatkan persetujuan resmi.

4. Pelaksanaan keuangan sekolah

Tahap pelaksanaan pada dasarnya berfokus pada kejelasan pembagian tugas operasional. Fase ini memastikan siapa saja personel yang dilibatkan, apa rincian pekerjaan yang harus dieksekusi, serta bagaimana batasan tanggung jawab dari masing-masing pemangku kepentingan. Secara garis besar, implementasi manajemen keuangan sekolah mencakup tahapan-tahapan berikut:

a. Penerimaan keuangan sekolah

Lembaga pendidikan dalam melaksanakan tugasnya menerima dana dari beberapa sumber dan itu perlu di bukukan berdasarkan pengelolaan yang selaras dengan ketentuan yang disepakati. Baik berupa konsep teoritis maupun peraturan yang berlaku. Berdasarkan buku RAPBS anggaran sekolah meliputi

anggaran rutin, anggaran pembangunan, donatur, Dll. yang dianggap sah oleh semua pihak. Pendanaan pendidikan yang pada dasarnya bersumber dari pemerintah, orang tua dan masyarakat, namun dapat diperoleh dari bentuk kerja sama usaha atau wakaf.²³

b. Pengeluaran keuangan sekolah

Menurut Levin M.H pengeluaran keuangan sekolah berhubungan dengan pembayaran keuangan sekolah untuk pembelian beberapa sumber dari proses sekolah. Pengeluaran dari sumber sekolah termasuk nilai setiap input yang digunakan, meskipun sekolah memberikan sumbangan atau tidak terlihat secara akurat dalam perhitungan pengeluaran. Pelaksanaan pengeluaran anggaran di sekolah disesuaikan dengan sumbernya yaitu Dana rutin, OPF, BP3, DIPA, Dll. Pelaksanaan kegiatan pembelanjaan keuangan mengacu kepada perencanaan yang telah ditetapkan. Mekanisme yang ditempuh di dalam pelaksanaan kegiatan harus benar, efektif dan efisien.²⁴

5. Evaluasi keuangan sekolah

Evaluasi pembiayaan pendidikan merupakan proses mengevaluasi rangkaian proses pembiayaan pendidikan mulai dan sampai tahap akhir pembiayaan pendidikan. Evaluasi pembiayaan pendidikan dalam hal ini dikategorikan sebagai proses pertanggung

²³ E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional..., hlm. 201

²⁴ Ibid.

jawaban yang diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan pendidikan.²⁵

Menurut Sallis bahwa “Sistem mutu selalu membutuhkan rangkaian umpan balik. Mekanisme umpan balik harus ada dalam sistem mutu. Hal tersebut bertujuan agar hasil akhir sebuah layanan bisa di analisa menurut rencana”. Pengawasan dan evaluasi adalah elemen kunci dalam perencanaan strategi. Jika sebuah institusi maka belajar dari pengalaman dan tidak statis, maka proses evaluasi dan umpan balik harus menjadi elemen yang esensial dalam kulturnya

Menurut Nanang Fattah secara sederhana proses pengawasan terdiri dari tiga kegiatan, yaitu memantau (monitoring), menilai dan melaporkan. Proses evaluasi ini dilakukan untuk dan agar kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan manajemen keuangan berjalan secara efektif dan efisien sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam prosesnya.²⁶ Dalam prosesnya, evaluasi atau laporan pertanggungjawaban Bantuan dalam Petunjuk Teknis (juknis) dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu:

1. Pertanggungjawaban Bantuan terdiri dari laporan pertanggungjawaban penerima Bantuan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.

²⁵ Nuril Azizah Megananda, “Manajemen Pembiayaan dalam Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Pondok Pesantren di Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang 2018), 52

²⁶ Ibid, II

2. Laporan pertanggungjawaban penerima Bantuan disusun dan disampaikan kepada PPK dalam bentuk cetak dan/atau salinan digital setelah pekerjaan selesai atau pada akhir tahun anggaran.
3. Laporan pertanggungjawaban penerima Bantuan merupakan dokumen yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.
4. PPK dan penerima Bantuan menyimpan sekurangnya masing-masing 1 (satu) rangkap salinan laporan pertanggungjawaban penerima Bantuan dalam bentuk cetak dan/atau digital, sebagai dokumen untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
5. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran adalah bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang berasal dari APBN serta disusun dan dilaporkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁷

Dalam tata kelola keuangan, tahap evaluasi dan pertanggungjawaban memegang peranan vital yang mencakup tiga aspek utama: bagaimana alokasi dana dikendalikan, wujud format pelaporannya, serta sejauh mana pelibatan pihak internal sekolah.

²⁷ Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3793 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan Asrama Pondok Pesantren Tahun Anggaran 2021

Proses evaluasi ini pada akhirnya akan menghasilkan informasi valid yang menjadi landasan bagi pengambilan keputusan di masa depan. Lebih dari sekadar catatan angka, sebuah dokumen pertanggungjawaban harus menguraikan arus pemasukan, pengeluaran, dan tata kelola administrasi pada setiap program sekolah secara komprehensif. Bahkan, laporan tersebut dituntut untuk menyajikan analisis mendalam yang membuktikan bahwa seluruh dana telah dimanfaatkan secara efisien dan patuh pada pedoman regulasi yang berlaku.

6. Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan

Pengelolaan keuangan sekolah tidak boleh dilakukan secara sembarangan, melainkan harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip manajerial yang baku. Landasan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, khususnya pada Pasal 48 ayat (1). Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap bentuk pengelolaan dana pendidikan wajib dijalankan dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas publik.²⁸

a. Transparansi

Transparansi artinya keterbukaan. Transparansi dalam manajemen keuangan pendidikan berarti adanya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan mulai dari sumber-sumber keuangan, pemanfaatan hingga pertanggung jawaban keuangan

²⁸ “Undang-Undang RI No tahun 2003 tentang SISDIKNAS,” yogyakarta pusat pelajar, 2011, 37.

pendidikan. Transparansi keuangan sangat diperlukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi bermanfaat untuk meningkatkan partisipasi orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam penyelenggaraan program pendidikan.

Transparansi juga meningkatkan kepercayaan antar orang tua, masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah melalui kemudahan dalam mengakses informasi-informasi keuangan pendidikan. Informasi keuangan pendidikan di sebuah lembaga pendidikan dapat dituangkan melalui RAPBS yang ditempelkan di papan pengumuman, ruang guru, ruang Tata Usaha (TU) maupun melalui media daring website lembaga pendidikan yang bersangkutan sehingga semua yang berkepentingan mudah mengetahui sumber keuangan serta pemanfaatannya.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas dalam manajemen keuangan pendidikan berarti penggunaan keuangan pendidikan dapat di pertanggung jawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan

yang berlaku pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab.

c. Efektivitas

Efektivitas diartikan sebagai ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Bukan hanya ketercapaian suatu tujuan tapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan dengan visi misi lembaga. Manajemen keuangan bisa dikatakan memenuhi efektivitas ketika kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan mampu mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh lembaga dan kualitas outcome nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dari awal.

d. Efisiensi

Konsep efisiensi menggambarkan hubungan antara pemasukan dan pengeluaran. Golany & Roll menjelaskan *“efficiency characterized by quantitative outputs”*. Namun lebih dari itu, efisiensi juga terkait dengan kualitas layanan dan keluaran dari aktivitas penyelenggaraan pendidikan. Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara masukan (input) dan keluaran (*output*) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud berupa pikiran, waktu, dan biaya. Dilihat dari segi penggunaan daya, penyelenggaraan kegiatan pendidikan bisa dikatakan efisien ketika mampu memanfaatkan waktu, tenaga dan biaya yang sekecil-kecilnya tapi dapat mencapai tujuan yang

telah direncanakan. Dilihat dari Hasil kegiatan pendidikan dapat dikatakan efisien manakala mampu memanfaatkan waktu, tenaga dan biaya tertentu mampu memberikan hasil yang sebaik-baiknya baik secara kualitas maupun kuantitas.²⁹

B. Mutu Pendidikan

1. Pengertian Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan secara luas di artikan sebagai gambaran dan karakteristik secara keseluruhan dari barang atau jasa yang mempresentasikan kemampuan memuaskan kebutuhan pelanggan yang ia diharapkan.³⁰ Hal ini dalam konteks pendidikan memiliki pengartian yang mencakup input, proses, dan *output* pendidikan. Di zaman sekarang yang dunia sangat cepat berubah-ubah, lembaga pendidikan terutama lembaga Islam (Madrasah) harus mengedepankan pada mutu, dimana lembaga bisa dikatakan bermutu ketika input, proses, dan output nya dapat bisa memuaskan tuntutan pengguna jasa pendidikan lembaga itu sendiri, apabila *performance* yang dihasilkan bisa melebihi apa yang menjadi tuntutan oleh stakeholder maka lembaga pendidikan barulah bisa dikatakan unggul.

Mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

²⁹ komariah, “konsep manajemen keuangan pendidikan.”

³⁰ Tanjung Enim, ‘STTE Manajemen Mutu Dan Pendidikan Mutu Melalui Standar Penjaminan Mutu (SPMI) Di STT Ebenhaezer’, 4.2 (2019), 152–63.

(KBBI), mutu pendidikan adalah kualitas atau ukuran baik buruknya proses perubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia³¹. Mutu memiliki arti kualitas, derajat, tingkat. Secara terminologi mutu memiliki arti cukup yang beragam, penuh dengan perdebatan. Standar mutu pendidikan di negara Indonesia. Standar mutu dalam pendidikan di Indonesia diterapkan melalui kurikulum nasional yang mencakup tujuan, kompetensi isi, serta sistem penilaian, termasuk pelaksanaan ujian nasional. Mutu dalam konteks umum mengacu pada tingkat keunggulan suatu produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dapat dinilai dari kualitas yang nyata maupun tidak nyata. Dalam dunia pendidikan, mutu mencakup proses pembelajaran dan hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik.

Mutu merujuk pada tingkat kualitas atau standar yang dimiliki oleh suatu produk, layanan, atau proses. Mutu bukanlah sesuatu benda yang ajaib atau rumit, melainkan didasarkan pada logika dan akal sehat. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, lingkungan kerja di desain dengan sedemikian rupa yang memungkinkan pendidik, orang tua, pejabat pemerintah, wakil masyarakat, dan perwakilan bisnis kerja berkolaborasi untuk memberikan sumber daya yang diperlukan siswa untuk menghadapi tantangan masa kini dan masa depan. Dalam Upaya

³¹ Mokh. Fakhruddin Siswopranoto, 'Standar Mutu Pendidikan', *Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam*, 6.1 (2022), 17–29 <<https://doi.org/10.54437/alidaroh.v6i1.372>>.

meningkatkan mutu pendidikan, perlu adanya pemimpin yang kompeten dan profesional dalam bidang pendidikan.³²

Kualitas pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas akan mempengaruhi perkembangan dan perekonomian suatu negara. Sebuah negara tidak akan menjadi maju tanpa pendidikan yang berkualitas. Namun, pendidikan yang berkualitas hanya dapat tercapai dengan dukungan kebijakan keuangan yang memadai. Pendidikan yang bermutu memerlukan sumber daya manusia, dana, bahan, mesin, dan metode yang baik karena merupakan sebuah proses, bukan hasil yang diperoleh secara instan.³³

Mutu pendidikan adalah kunci terbentuknya sumber daya manusia unggul. Sumber manusia unggul akan menentukan kemajuan dan ekonomi negara bangsa. Tidak ada negara yang maju melainkan dalam pendidikan belum mempunyai mutu. Akan tetapi, Pendidikan bermutu hanya bisa terwujud dengan dukungan kebijakan finansial yang memadai. Pendidikan yang berkualitas memiliki *man, money, material, machine, method* yang bermutu karena merupakan proses bukan hasil instan.³⁴ Kualitas pendidikan merupakan fondasi utama bagi daya saing suatu negara, terutama dalam menghadapi dinamika global saat ini. Menariknya, penentu mutu pendidikan tersebut tidak terbatas pada

³² B A B Ii and Pengertian Analisis, 'Dunn, William N. Pengantar Analisis Kebijakan Publik . (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000). 12 13', 13–50.

³³ Dalmeri, dkk, Islamic Quality Education Management, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), 122

³⁴ Jejen Musfah, Manajemen Mutu Pendidikan: Teori dan Kebijakan, (Jakarta: Kencana, 2023), h. 2

urusan teknis seperti kurikulum dan metode belajar, tetapi sangat bergantung pada seberapa efektif manajemen dan kepemimpinan sekolah dijalankan. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, paradigma Manajemen Mutu Terpadu (MMT) atau *Total Quality Management* (TQM) kini kian banyak diadopsi.³⁵ Pendekatan ini menekankan pentingnya evaluasi dan perbaikan secara berkesinambungan, sinergi antar pemangku kepentingan, serta visi kepemimpinan yang inovatif.

Edward Sallis mengatakan, *Total Quality Management is a philosophy of continuous improvement, which can provide any educational institution with a set of practical tools for meeting and exceeding present and future customer needs, wants, and expectations.*³⁶ *Total Quality Management* (TQM) adalah suatu pendekatan yang berfokus pada perbaikan yang berkelanjutan, memberikan institusi pendidikan alat-alat yang efektif untuk memenuhi kebutuhan, harapan, dan keinginan siswa serta masyarakat, baik sekarang maupun di masa yang akan datang.

2. Prinsip mutu pendidikan

Dalam peningkatan mutu pendidikan sebuah lembaga yang terjadi saat ini memiliki tujuan paling utama. Bagi pembangunan pendidikan berkelanjutan penting bahwa pendidik harus memiliki

³⁵ Tambunan.

³⁶ Halim AYZ, 'Total Quality Management in Education', *International Journal of Social Science, Innovation and Educational Technologies*, 36, 2023, 1–17 <<https://doi.org/10.54603/iss.185>>.

prinsip manajemen efektif dan efisien untuk mengelola perubahan serta pembangunan demi tercapainya sebuah pendidikan yang bermutu.

Menurut Hensler dan Brunell, terdapat empat prinsip dasar yang penting dalam manajemen mutu pendidikan, yaitu sebagai berikut:³⁷

- a. Prinsip Pelanggan, mutu tidak hanya berarti memenuhi standar tertentu, namun juga ditentukan oleh kepuasan dan harapan pelanggan, sehingga menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan.
- b. Respek Terhadap Setiap Orang, dalam sekolah yang bermutu kelas dunia, setiap individu di dalamnya dianggap memiliki potensi yang signifikan dan berpotensi untuk berkembang menjadi sumber daya yang berkontribusi pada masyarakat.
- c. Manajemen Berdasarkan Fakta, sekolah harus berorientasi pada data yang akurat, sehingga setiap Keputusan dibuat berdasarkan informasi yang jelas dan objektif, bukan hanya berdasarkan persepsi subjektif atau ingatan.
- d. Perbaikan Secara Berkala, diperlukan untuk memastikan kesuksesan setiap sekolah, sehingga perbaikan harus dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.

Mutu pendidikan dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu manfaat bagi individu, masyarakat, dan bangsa-negara. Dalam konteks

³⁷ Ii and Analisis.

mutu pendidikan, beberapa orang menilai mutu pendidikan dari perspektif tingkat keilmuan yang ingin dicapai oleh seseorang ingin mengenyam pendidikan. Di dalam sebuah proses pendidikan, mengenai mutu berkaitan dengan beberapa aspek yang antara lain bahan ajar, metode pengajaran, fasilitas/sarana prasarana tenaga pendidik, pembiayaan, lingkungan dan faktor-faktor lainnya. Dalam konteks pendidikan, kualitas hasil belajar terkait dengan prestasi yang dicapai oleh suatu sekolah dalam jangka waktu tertentu. Prestasi ini bisa mencakup pencapaian dalam tes akademik seperti ulangan harian, ujian nasional, rapor, serta keberhasilan di bidang non-akademik seperti olahraga, seni, atau keterampilan.³⁸

3. Ruang Lingkup Mutu Pendidikan

Mutu memiliki arti yang mencakup tingkat kelebihan suatu produk atau hasil, bisa berupa jasa/barang, dan dapat berupa atribut yang bisa kita lihat maupun tidak. Di dalam konteks pendidikan, sebuah mutu dapat di mana sebuah proses pendidikan dan hasil yang mempengaruhi kualitas pendidikan.

Dalam pendidikan mutu elemen interaktif sangat mempunyai peran penting, seperti bahan ajar kognitif, efektif, dan psikomotorik, dan serta metodologi guru yang bersifat fleksibel sesuai dengan kemampuannya, memungkinkan interaksi yang lebih efektif. Di sisi lain, sarana sekolah, dukungan administrasi, sarana prasarana, dan

³⁸ Ii and Analisis.

sumber daya lainnya serta suasana yang kondusif memungkinkan proses belajar mengajar berjalan dengan baik. Manajemen sekolah ataupun kelas memiliki peran penting dalam mengintegrasikan semua elemen yang harmonis, termasuk interaksi antara guru, siswa, dan sarana pendukung dikelas.

Kualitas atau mutu memiliki definisi yang beragam, mulai dari yang konvensional hingga yang lebih strategis. Definisi konvensional kualitas biasanya meliputi ciri-ciri langsung dari suatu produk, seperti kinerja, keterbatasan, kemudahan penggunaan, estetika, dan lain-lain. Di sisi lain, definisi kualitas yang lebih strategis melibatkan kemampuan suatu produk untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan, sehingga memungkinkan suatu produk untuk menjadi lebih relevan dan efektif dalam memenuhi kebutuhan pasar.

4. Standar Mutu Pendidikan

Secara Nasional standar mutu pendidikan merujuk pada PP No. 19 tahun 2005 menyatakan bahwa SNP (Standar Nasional Pendidikan) yaitu sebagai berikut:

a. Standar isi

Standar isi pendidikan menentukan batasan materi dan Tingkat keahlian yang harus dicapai oleh siswa dalam satu jenjang dan jenis pendidikan. Standar ini terdiri dari kriteria yang mengatur kompetensi tamatan, materi Pelajaran, dan silabus yang harus dipenuhi siswa.

b. Standar proses

Standar proses pendidikan nasional mengatur pelaksanaan kegiatan pembelajaran di suatu institusi pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

c. Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan yaitu standar nasional pendidikan yang mengatur kemampuan minimal yang harus dimiliki peserta didik, termasuk pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk dinyatakan lulus.

d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah standar pendidikan nasional yang mencakup syarat minimal yang harus dipenuhi oleh pendidik dan tenaga kependidikan.

e. Standar Sarana dan Prasarana

Standar sarana dan prasarana pendidikan nasional mengatur kriteria minimal yang diperlukan untuk fasilitas belajar, ibadah, olahraga, perpustakaan, laboratorium, bengkel, tempat bermain dan rekreasi, serta sumber daya lain yang mendukung proses belajar-mengajar, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

f. Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan pendidikan nasional menekankan pentingnya perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan kegiatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pendidikan.

g. Standar Pembiayaan

Standar pembiayaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan biaya untuk penyelenggaraan satuan pendidikan.

h. Standar Penilaian Pendidikan

Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional untuk pendidikan yang mencakup semua hal yang berkaitan dengan penilaian pendidikan, termasuk mekanisme, prosedur, dan alat.

Penjaminan mutu pendidikan juga diatur oleh negara dalam peraturan menteri pendidikan Nasional Nomor 63 tahun 2009 tentang sebuah sistem penjaminan mutu pendidikan.³⁹ Dalam peraturan tersebut, penjaminan mutu pendidikan diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang sistematis dan terpadu yang berorientasi untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa. Kegiatan yang tersusun sistematis tersebut dilakukan oleh program atau satuan pendidikan,

³⁹ Enim.

pemerintah daerah, penyelenggara satuan/program pendidikan, serta melibatkan dunia usaha. Arcaro S Jerome sebagaimana dikutip oleh Enim Tanjung dalam artikelnya mengatakan bahwa terdapat 5 karakteristik sekolah yang bermutu yaitu: fokus pada pelanggan, keterlibatan total, pengukuran, komitmen dan perbaikan berkelanjutan. Tanggung jawab untuk membangun sistem pendidikan bermutu sesuai ekspektasi masyarakat tidak bisa hanya dibebankan kepada pihak sekolah. Dibutuhkan sinergi dan peran aktif dari seluruh elemen, khususnya orang tua dan dunia usaha sebagai pelanggan internal dan eksternal dari institusi pendidikan.

Komponen pendidikan harus memberikan dukungan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Untuk peningkatan mutu pendidikan, sekolah harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Kepemimpinan sekolah yang kuat, kepala sekolah harus mampu menggunakan dan menjalankan peran kepemimpinannya untuk mendorong dan melaksanakan pengambilan keputusan guna meningkatkan mutu sekolah.
- b. Pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif, khususnya instruktur, sangatlah penting. Dari kebutuhan pengajaran hingga pelatihan, evaluasi kinerja, dan penghargaan.
- c. Sekolah mempunyai kewenangan untuk memperbaiki diri dan mengembangkan kemampuannya.

- d. Sekolah memiliki keterbukaan, keterbukaan adalah transparansi dalam proses manajemen seperti pengambilan keputusan, keuangan sekolah, dan evaluasi kegiatan.
- e. Sekolah terus-menerus mengevaluasi dan meningkatkan hasil pembelajaran siswa dan program pengajaran. Ini membantu sekolah berkembang nantinya.
- f. Komunikasi yang baik, sekolah harus berkomunikasi dengan baik dengan mitra internal dan eksternal. Komunikasi yang efektif menjamin seluruh kegiatan sekolah dapat berhasil dengan melibatkan seluruh komponen.⁴⁰

Pada dasarnya, kinerja seorang guru mencerminkan dua belas kompetensi esensial yang harus diaplikasikan selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Keberhasilan guru dalam menunaikan tugasnya dapat diukur melalui enam indikator utama, yaitu: (1) kualitas, (2) kuantitas, (3) ketepatan waktu, (4) efisiensi biaya, (5) tingkat kebutuhan akan pengawasan, serta (6) pengaruh interpersonal. Terpenuhinya keenam indikator evaluasi ini secara otomatis akan memunculkan efek positif dari proses pembelajaran terhadap mutu dan pencapaian sekolah secara keseluruhan.

5. Faktor-faktor Peningkatan Mutu Pendidikan

Dalam meningkatkan mutu pendidikan di suatu lembaga pendidikan, Sudarwan Danim berpendapat bahwa perlu melibatkan

⁴⁰ Prinsip-prinsip Manajemen Tenaga and Pendidik Dan, 'Prinsip-Prinsip Manajemen Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan', 2016, 1–8.

beberapa faktor penting dalam Upaya meningkatkan mutu pendidikan antara lain:⁴¹

a. Kepemimpinan kepala sekolah

Dalam hal ini kepala sekolah harus memiliki dan memahami visi kerja yang jelas dan spesifik, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dan berkomitmen pada kerja keras. Selain itu, mereka harus mampu memberikan layanan yang terbaik dan memantau disiplin kerja secara efektif.

b. Pendidik

Pendidik aktif berpartisipasi dalam kegiatan, termasuk workshop dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja mereka. Hasil dari kegiatan ini dapat diterapkan di lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

c. Peserta didik

Peserta didik sendiri memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan, karena mereka menjadi fokus utama. Oleh karena itu, kompetensi dan kemampuan siswa harus dikembangkan agar sekolah dapat memanfaatkan kelebihan yang dimiliki peserta didik.

⁴¹ Sudarwan Danim, *Visi Baru Manajemen Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 56.

d. Kurikulum

Dengan adanya kurikulum yang konsisten dan dinamis, standar mutu yang diinginkan dapat lebih mudah dicapai, sehingga tujuan dapat tercapai secara maksimal.

e. Jaringan kerja sama

Meningkatkan kerja sama dengan pihak-pihak terkait, baik di lingkungan sekolah maupun di luar, seperti organisasi lainnya.